



**KEWENANGAN DISKRESI KEJAKSAAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

**TESIS**

**RUDI ISKANDAR**

**1810622070**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
TAHUN 2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Rudi Iskandar

NIM : 1810622070

Tanggal : 17 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2021

Yang menyatakan,



Rudi Iskandar

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Iskandar  
NIM : 1810622070  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEWENANGAN DISKRESI KEJAKSAAN DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya :

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal :  
Yang menyatakan,



Rudi Iskandar

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Rudi Iskandar  
NIM : 1810622070  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice*

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. BENIHARMONI HAREFA, SH, LLM

Ketua Penguji

Prof. Dr. AGUS SURONO, S.H., M.H.

Penguji I

Dr. SLAMET TRI WAHYUDI, SH, MH

Penguji II



Dr. ABDUL HALIM, M. Ag

Dekan

Dr. BENIHARMONI HAREFA, SH, LLM

Ka. Prodi

## ABSTRAK

Judul Tesis ini adalah “**Kewenangan Diskresi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice***”, dengan permasalahan yang dikaji yaitu kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice*.

Metode penelitian penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dengan pendekatan penelitian berupa *case approach* serta sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian preskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan mendapatkan saran-saran mengenai kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang efektif dalam hal kerugian negaranya kecil berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi agar dalam penanganan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun kenyataannya tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk dilakukan pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran cukup besar, sehingga tidak efektif dan efisien.

Kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak melebihi batasan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan, sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi sistem pengembalian keuangan negara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* yaitu kurangnya pemahaman para penyelidik terhadap pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil tetap dilakukan pembuktian di persidangan.

**Kata Kunci:** **Diskresi; Jaksa Agung; Keadilan; Surat Edaran, *Restorative Justice*.**

## ABSTRACT

The title of this thesis is "The Attorney's Discretionary Authority in the Settlement of Criminal Acts of Corruption Based on the Restorative Justice Approach", with the problems studied, namely the discretionary authority of the Prosecutor's Office in handling corruption crimes based on the restorative justice approach and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in implementing discretionary authority in order to optimize settlement of criminal acts of corruption with a restorative justice approach.

The research method of writing this thesis is to use the type of normative research. Normative research is legal research that uses secondary data sources such as principles and doctrines in legal science, with a research approach in the form of a case approach and the nature of the research used is prescriptive research which is research that aims to obtain suggestions regarding the discretionary authority of the Public Prosecutor's Office in Effective handling of corruption cases in terms of small state losses based on the Restorative Justice approach.

The Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010 is a law enforcement effort by law enforcement officers in the context of achieving peace and tranquility in society and law enforcement officers as an effort to eradicate crime. corruption, one of the points in its contents is to instruct all High Prosecutor's Offices so that in handling corruption crimes, people who consciously have returned state losses need to be considered not to be followed up on the principle of restorative justice. The Circular was issued to focus on handling corruption crimes with large state losses, but still many corruption crimes with small losses are still being processed for evidence in court using a large enough budget.

The prosecutor's discretionary authority in handling corruption crimes is based on the Restorative Justice approach in handling corruption crimes whose state financial losses do not exceed the limits on the use of the budget, so that justice and balance are created for the state financial return system. The obstacles faced by the Prosecutor's Office in applying discretionary authority to optimize the settlement of corruption crimes with a Restorative Justice approach are the investigators' lack of understanding of the quality pattern of handling corruption cases, and the Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-1113/ The F/Fd.1/05/2010 dated May 18, 2010 does not have the power or a strong legal basis such as the laws and regulations so that in law enforcement against criminal acts of corruption with small state losses, evidence is still carried out in court.

**Keywords: Discretion; Attorney General; Justice; Circular, Restorative Justice.**

## KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Kewenangan Diskresi Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice*”**.

Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana terkhusus dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan dalam penegakan hukum yang berprinsip keadilan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Jakarta, Juli 2021



Rudi Iskandar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Kerangka Teori .....	13
1.6 Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	29
B. Tinjauan Umum Diskresi .....	37
1. Pengertian dan Pelaksanaan Diskresi .....	37
2. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Diskresi .....	40
C. Batasan Diskresi Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	45
D. Optimalisasi Diskresi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian .....	64
B. Pendekatan Masalah .....	65
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	68
D. Teknik Pengumpulan Data .....	68
E. Teknik Analisis Data .....	69
F. Sifat Penelitian .....	70
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>71</b>
A. Kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan <i>restorative justice</i> .....	71
B. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan <i>restorative justice</i> .....	85



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>104</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	